

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2000)
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- _____, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- An Nisa Lubis, *Analisis Yuridis Kesalahan Materiil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya*. (Medan: USU Medan. 2016)
- Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Bin Cheng, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2011)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014)
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011)
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- H. Zinuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

- Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- _____, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa Nusamedia, 2006)
- _____ *Pure Theory of Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008)
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: 1993)
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: BigrafPublishing, 1995).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Pamaitha, 1991)
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003).
- _____, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005)

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993)
- Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cet. 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 1979)
- Roesnastiti Prayitno, *Kode Etik Notaris*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020)
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Sri Mamudj, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Standar Operasional Produr (SOP) *Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam, (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Tergugat Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Victor. M. Situmorang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta Jakarta 1993)

ON-LINE DARI INTERNET

Abd. Rasyid As'ad, 5 November 2012, Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada 13 November 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

Kasus Notaris di Blora jadi Tersangka, 2022, <https://inilahjogja.com/polisi-tetapkan-notaris-di-blora-jadi-tersangka/>, diakses pada Selasa tanggal 17 oktober 2023 pukul 12.00 WIB.

Pemalsuan akta Tanah Yang Disebabkan Oknum Notaris Ditahan, 2019, <https://www.balipost.com/news/2019/11/26/93321/Begini,Kronologis-Pemalsuan-Akta-Tanah...html> diakses pada Selasa tanggal 17 oktober 2023 pukul 12.00 WIB.

JURNAL

Aan Handriani dan Edy Mulyanto, Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi, *Pamulang Law Review*, Vol 4: 2021.

Brainer Livingtone Mala, Akspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Lex Administratum*, Vol. V, N.1 2017.

Johan Wahyudi, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, *Jurnal Perspektif*, Volume XVII No. 2 Edisi Mei Tahun 2012.

Ni Nyoman Juliantari, Syamsul Bachri dan Farida Patittingi, Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Pasca Unhas*.

S.F.Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.9 Vol 4 – 1997.

Sharia, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*, Vol.1, No.2, Desember 2019.

Tri Ulfi Handayani, Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohaturun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, (*Jurnal Akta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia), Vol 5, No. 1, (2018).

Tubagus Akhmad Rama Fauzi, *Tinjauan Yuridis kewajibann Notaris Menjaga Kerahasiaan Informasi Berkaitan Dengan Akta Dalam pemberian Saksi Pada proses Peradilan*. *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.2, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3746)

Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 8/PDT.G/2018/PN LBJ

